

Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*

Cindy Rayhan Salsabilla^{1*}, Erinoss NR^{2*}

^{1,2} Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: cindysalsabilla@gmail.com

Tanggal Masuk:

17 September 2022

Tanggal Revisi:

19 Januari 2023

Tanggal Diterima:

20 Januari 2023

Keywords: Attitudes;

Behavior Control;

Religiosity; Whistleblowing

Intentions.

How to cite (APA 6th style)

Salsabilla, C. R. & Erinoss, N.R. (2023). Pengaruh Sikap, Kontrol Perilaku dan Religiusitas terhadap Niat Melakukan Whistleblowing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 5 (2), 479-494.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v5i2.670>

Abstract

The purpose of this research is to determine the influence of attitudes, behavior control and religiosity towards the whistleblowing intentions. This research using purposive sampling method with the respondents working at the Local Government Organization in Bukittinggi City. Respondent consists of 121 people, who served as a head of finance, treasurer expenditures, finance staff, budget makers, commitment making officers, Paying Order Signing Officers, Budget User Authorizations. The data collection technique used in this research is field research in the form of researchers distributing structured questionnaires to 26 Local Government Organizations in Bukittinggi City. This data was analyzed by using multiple regression analysis in SPSS. From the results of data processing, it can be seen that the first variable is the attitude of influence on the intention of whistleblowing with a calculated value of $t_{count} > t_{table}$ that is $7.198 > 1.661$ it can be said that the first hypothesis received. The results of testing the second variable, namely behavioral control has no affection the intention to do whistleblowing with $t_{count} < t_{table}$ ie $-0.359 < 1.661$. The religiosity variable is known that as a positive effect with $t_{count} > t_{table}$ that is $1.967 > 1.661$ So it can be said that third hypothesis accepted.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus kecurangan maupun ketidakadilan yang terjadi pada pemerintah daerah menjadi salah satu contoh berita yang banyak dinantikan oleh masyarakat. Survei Fraud Indonesia tahun 2016 mengungkapkan bahwa lembaga yang paling banyak dirugikan karena kecurangan adalah lembaga pemerintahan sebesar 48,5%. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan bahwa tindak kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia yaitu Korupsi sebanyak 69,9%. UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara.

Data dari ICW (*Indonesia Corruption Watch*) menunjukkan bahwa dari tahun 2004 sampai dengan 2018 KPK telah menangani 104 Kepala Daerah tersandung korupsi. Jumlah paling tinggi justru terjadi pada Tahun 2018 yakni sebanyak 29 kasus disusul 2014

sebanyak 14 kasus . Penyebab semakin menjamurnya korupsi di daerah adalah lemahnya pengawasan Pemerintah Pusat pada Pemerintah Daerah mengakibatkan penyalahgunaan wewenang kerap dilakukan Pejabat Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan banyaknya kasus tentu akan berdampak kepada pelayanan kepada masyarakat dan perkembangan daerah itu sendiri. *Whistleblowing* merupakan salah satu solusi yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi.

Kasus kecurangan yang menghebohkan masyarakat adalah terungkapnya kasus E-KTP “Papa Minta Saham” tahun 2015 yang melibatkan para petinggi pemerintahan yaitu Sudirman Said (SS) menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan Setya Novanto (SN) yang menjabat sebagai Ketua DPR RI kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dimana Setya Novanto diduga meminta beberapa persen saham PT. Freeport Indonesia tapi mengatasnamakan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada saat itu yaitu Joko Widodo dan Jusuf Kalla (medium.com, 9 oktober 2017) Tindakan Sudirman Said melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan disebut sebagai *Whistleblowing*.

Whistleblowing merupakan pelaporan yang dilakukan oleh anggota organisasi aktif maupun nonaktif terkait dengan pelanggaran, kejanggalan, kecurangan, tindakan ilegal, tindakan tidak bermoral atau beretika kepada pihak internal maupun eksternal organisasi (Near dan Miceli 1985) dalam (Hwagen et al.,2008:505). *Whistleblower* adalah pegawai atau karyawan yang berani melaporkan adanya penyimpangan yang terjadi dalam instansi karena mereka memiliki bukti yang kuat dan mereka sangat percaya bahwa bukti tersebut dapat menjadi pendukung mereka untuk melaporkan penyimpangan yang terjadi di institusi.

Whistleblower dalam kehidupan sehari-hari bukanlah perkara mudah. Resiko yang akan diterima karena menjadi *whistleblower* akan sangat banyak salah satu risikonya adalah pembalasan dari pihak yang dilaporkan (seperti pengurangan gaji atau tunjangan, penurunan jabatan dll) perhatian dari media, serta perasaan mengkhianati perusahaan dimana ia bernaung. Meminimalisir risiko *whistleblower*, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diantaranya menyebutkan bahwa saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah menerapkan aturan *whistleblowing system* sebagai salah satu solusi yang efektif untuk mengungkapkan kecurangan yang terjadi. Peraturan terkait *whistleblowing system* tertuang dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

Theory Planned Of Behavior (Teori Perilaku Terencana) menjelaskan bahwa untuk melakukan sesuatu didasari oleh niat, oleh karena itu agar *Whistleblowing* dapat bermunculan terlebih dahulu diketahui apa saja yang menjadi faktor seorang Aparatur Sipil Negara memiliki niat melakukan *Whistleblowing*. Winardi (2013) menyatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan *whistleblowing* di Indonesia yaitu sikap terhadap *whistleblowing (attitude towards whistleblowing)*. Ponnu et al. (2008) menyatakan bahwa sikap terhadap *whistleblowing* dapat diartikan sebagai sejauh mana individu memiliki hasil menguntungkan atau tidak menguntungkan dari konsekuensi *whistleblowing*. *Whistleblower* yang ingin melakukan tindakan *whistleblowing* harus memiliki keyakinan bahwa jika mereka melakukan *whistleblowing* maka akan mendatangkan keuntungan bagi individu yang akan melakukannya.

Kontrol perilaku pada dasarnya didasari oleh faktor yang menjadi penghambat atau faktor yang menjadi pendukung individu-individu menjadi *whistleblower*. Salah satu

contoh kontrol perilaku yang dilakukan perusahaan terhadap individu yang ingin menjadi *whistleblower* yaitu dengan cara menggagalkan atau mengabaikan secara sengaja laporan kecurangan yang akhirnya menghambat langkah individu dalam melakukan *whistleblowing* (Ponnu et al., 2008). Teori yang digunakan Ajzen (1991) dalam kasus ini yaitu teori perencanaan perilaku yang menjelaskan bahwa semakin banyak individu mendapatkan dukungan untuk melaporkan kecurangan maka keinginan mereka untuk melaporkan kecurangan juga meningkat, sebaliknya semakin sedikit individu mendapat dukungan untuk melaporkan tindakan kecurangan maka semakin menurun juga keberanian individu untuk melaporkan kecurangan dan individu cenderung untuk lebih mempersiapkan diri karena sedikitnya dukungan yang didapat.

Religiusitas juga merupakan hal yang dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Terutama di negara berkembang seperti Indonesia dimana banyak orang-orang yang bertindak melakukan sesuatu berdasarkan budaya, anjuran agama, kepercayaan dll (Lewis, 1978). Barnett (1996) dalam hasil penelitiannya menemukan bahwa religiusitas cenderung memiliki standar yang sangat mutlak yang merupakan bentuk dari perilaku etis masyarakat karena standar tersebut tertuang dalam kitab dari masing-masing kepercayaan yang dianut individu yang menjadi pedoman masyarakat dalam berperilaku.

Penelitian tentang *whistleblowing* sudah pernah dilakukan sebelumnya, tapi masih banyak terdapat perbedaan atau inkonsistensi contohnya penelitian oleh Saud (2016) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Park & Blenkinsopp (2009), Alleyne (2013) dan Damayanthi et al. (2017) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku justru berpengaruh terhadap intensi seseorang melakukan *whistleblowing*. Sikap menurut Winardi (2013), Zakaria, Razak dan Noor (2016), Damayanthi (2017) dan Alleyne et al. (2013) mempengaruhi niat seseorang melakukan *whistleblowing*, berbeda dengan Parker et al. (1992) menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap intensi individu melakukan *whistleblowing*

Banyaknya perbedaan dengan peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh sikap, kontrol perilaku dan religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada daerah yang berbeda menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan pada penelitian terkait niat *whistleblowing*. Penelitian ini lebih menfokuskan responden kepada Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bukittinggi. Bagian Keuangan merupakan pengguna paling potensial dari sistem *whistleblowing* karena pegawai pada bagian keuangan secara aktif terlibat dalam kegiatan operasional dan teknis dari instansi tersebut (Magnus dan Viswesvaran, 2005). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan dan memperoleh bukti empiris sejauhmana pengaruh sikap, kontrol perilaku, religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

REVIEW LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Perencanaan Perilaku (*Theory of Planned Behavior*)

Teori yang digunakan adalah *Theory of Planned Behavior* yaitu teori psikologi yang menjelaskan hubungan antara sikap dengan perilaku yang dikemukakan oleh Ajzen (1991). Ajzen (1991) berpendapat bahwa *Theory of Planned Behavior* didasarkan pada pendapat atau asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang akan memperhitungkan manfaat dan resiko dari tindakan yang akan mereka dapatkan sebelum mereka memutuskan untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Alasan digunakannya *Theory of Planned Behavior* karena teori ini mampu mengidentifikasi dan menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai

keyakinan seseorang, sehingga dapat membedakan apakah sesuatu yang mereka lakukan itu merupakan perilaku yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Ajzen(1991) menemukan 3 prediktor umum yang dapat menimbulkan keinginan individu untuk melakukan sesuatu perilaku, tiga prediktor utama tersebut yaitu sikap terhadap suatu perilaku (*attitude toward the behavior*), norma subjektif (*subjective norm*) dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioralcontrol*).

Whistleblowing

Near dan Miceli (1985) dalam Elias (2008) mendefinisikan *whistleblowing* sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi (mantan anggota organisasi atau yang masih menjadi anggota organisasi) atas suatu praktek-praktek ilegal, tidak bermoral, tidak etis, tidak beretika, tidak bertanggung jawab dibawah kendali kepemimpinan kepada individu atau organisasi yang dapat menyebabkan efek tindakan korektif, sehingga pencegahan praktik atau tindakan penipuan dan kecurangan bisa dilakukan karyawan internal perusahaan atau oleh manajemen perusahaan. *Whistleblowing* adalah pengungkapan pelanggaran, penipuan atau pengungkapan tindakan yang bertentangan dengan hukum, tindakan tidak etis tidak bermoral atau tindakan lain yang dapat membahayakan organisasi, perusahaan atau pemangku kepentingan yang dilakukan oleh karyawan atau pemimpin organisasi kepada pemimpin organisasi lainnya ataupun pada karyawan atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*) (KNKG, 2008).

Sikap

Sikap menurut Davis et al (dalam Jogiyanto, 2007) adalah pernyataan evaluatif terhadap objek, orang atau peristiwa yang dapat menggambarkan perasaan seseorang terhadap suatu situasi yang sedang terjadi. Sikap juga merupakan faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif terhadap perilaku (Gerungan, 2004:160). Sikap merupakan suatu reaksi pandangan atau perasaan seorang individu terhadap suatu objek. Walaupun objeknya sama, namun tidak semua individu mempunyai sikap yang sama, hal itu dapat dipengaruhi oleh situasi yang dialami individu, pengalaman, informasi dan kebutuhan masing-masing individu (Cheisviyanny & Arza, 2019). Sikap seseorang terhadap objek akan membentuk perilaku individu terhadap objek.

Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku menurut Ajzen (1991) adalah kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku, semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan seseorang atau individu dalam melakukan sesuatu maka semakin kuat niat seseorang melakukan perilaku tersebut. Pengendalian dalam diri seorang individu terhadap perilaku dan tindakannya disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Jika seorang individu yakin akan tindakan yang akan dilakukan telah melalui proses kontrol pada dirinya maka niat atau intensi seseorang untuk melakukan suatu tindakan kebaikan, salah satu contohnya *whistleblowing* akan meningkat. Salah satu bentuk kontrol individu yaitu ketika mendapat ancaman dari pihak lain ketika ingin mengungkap kecurangan, dengan adanya ancaman tersebut akan timbul rasa tidak nyaman atau takut untuk mengungkap kecurangan

Religiusitas

Religiusitas adalah tingkat keimanan, keyakinan, kesalehan, pengabdian, dan kekudusan yang diharapkan oleh seorang individu dalam sebuah sekte keagamaan (Lewis,

1978). Religiusitas dapat dibagi menjadi dua kategori: *religious affiliation* dan *religious commitment*. Dua kategori religiusitas ini dikembangkan oleh Brooks dan Sellani (2005) yang berpendapat bahwa *Religious affiliation* mengacu pada konsep bahwa individu berasal dari sebuah aviliasi atau kelompok tertentu, seperti paguyuban, tempat ibadah, lembaga keagamaan dll. *Religious commitment* mengacu pada tingkatan religiusitas dan komitmen individu terhadap keimanan yang dapat diukur dengan tingkat kerajinan mereka melakukan ibadah seperti melakukan kunjungan atau berdoa ke gereja, sholat berjamaah di masjid, memberikan infaq atau beramal, serta keterlibatannya dalam aktivitas keagamaan. Kesimpulannya tingkatan religiusitas seseorang bisa mendorong seseorang untuk melaporkan *wrongdoing* yang terjadi di organisasi atau perusahaan. Tingkat religius mencerminkan seberapa individu mengimani ajaran pencipta-Nya

Penelitian Terdahulu

Rijadh Djatu Winardi (2013) *The influence of individual and situational factors on Lower-level civil servants' whistle-blowing Intention in Indonesia* menyatakan bahwa Sikap, dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Caesar Marga Putri (2015), Pengaruh Jalur Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang Melakukan *Whistleblowing* menemukan bahwa tingkat religiusitas tidak berpengaruh terhadap niat individu melaporkan *Whistleblowing*. Philmore Alleyne, Dwayne Devonish, Julia Allman (2010) *Measuring Ethical Perceptions and Intentions Among Undergraduate Students in Barbados* menemukan bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Maheran Zakaria, Siti Noor Azmawaty, Abdul Razak, Wan Nurul Basirah Wan Mohd Noor (2016) *Effects of Planned Behavior on Whistle Blowing Intention: Evidence from Malaysian Police Department* menemukan bahwa Sikap berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* tapi kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing*

Pengembangan Hipotesis

Sikap

Sikap adalah keadaan atau suatu kondisi dalam diri manusia yang dapat menggetarkan manusia untuk bertindak atau tidak bertindak (Kreshastuti & Prastiwi, 2014). Park dan Blenkinsopp (2009) menyatakan bahwa sikap terhadap *whistleblowing* yaitu mengenai seberapa jauh dampak positif atau dampak negatif dari *whistleblowing* itu sendiri. *Whistleblower* harus memiliki keyakinan bahwa melakukan *whistleblowing* akan berdampak positif seperti melindungi organisasi, memberantas korupsi, memunculkan efek jera. Selanjutnya keyakinan akan sikap tersebut dievaluasi oleh sistem penilaian individu dan memunculkan tindakan emosional. Damayanthi et al. (2017) dari hasil penelitiannya menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap intensi melakukan (*whistleblowing*). Saud (2016) juga mendukung pernyataan Damayanthi, Saud menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niatan individu melakukan *whistleblowing*. Semakin tegas dan bijaksana sikap *whistleblower* terhadap perilaku *whistleblowing* maka akan meningkatkan niat pelaku dalam melakukan tindakan *whistleblowing*. Berdasarkan uraian diatas maka didapat hipotesis.

H1 : Sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Kontrol Perilaku

Park dan Blenkinsopp (2009) menyatakan bahwa kontrol perilaku pada *whistleblowing* dapat diketahui dengan melakukan evaluasi hasil dari keyakinan *whistleblower*. Keyakinan *whistleblower* ini menghasilkan faktor kontrol *whistleblowing* yang berasal dari adanya dukungan atau hambatan yang dilakukan organisasi ketika seseorang individu melaporkan adanya *wrongdoing* di organisasi, dukungan bisa berbentuk

perlindungan dan hambatan bisa berbentuk penindasan yang dilakukan atasan pada bawahan yang akan melakukan *whistleblowing* dan juga pengabaian dengan sengaja atas pelaporan *wrongdoing*. Alleyne (2013) menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Pernyataan ini juga didukung oleh penelitian Damayanthi et al. (2017) yang juga menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat seseorang melakukan (*whistleblowing*). Berdasarkan uraian diatas maka didapat hipotesis.

H2 : Kontrol Perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

Religiusitas

Keller (2007) menyatakan bahwa religiusitas merupakan hal yang mendasar dalam pembentukan standar etik seorang individu atau untuk jadi cerminan menilai perilaku etis seseorang, atau baik buruknya perilaku dalam diri seseorang. Ilmu agama menjelaskan bagaimana seharusnya berperilaku pada sesama manusia, berperilaku pada alam ataupun ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia di muka bumi maupun bagaimana berperilaku pada Tuhan sang Pencipta, apa saja yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Barnett et al (1996) yang menyatakan bahwa religiusitas seseorang berpengaruh terhadap bagaimana individu mengambil keputusan untuk melaporkan atau tidak melaporkan tindakan kecurangan (*wrongdoing*). Berdasarkan uraian diatas maka didapat hipotesis.

H3 : Religiusitas berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen, yaitu sikap, kontrol perilaku dan religiusitas terhadap variabel dependen, yaitu niat melakukan *whistleblowing* (Sugiyono, 2013:2). Populasi adalah area generalisasi objek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh para peneliti dengan berbagai syarat agar dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi pada penelitian ini adalah 26 OPD Kota Bukittinggi yang diperoleh dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:80) . Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling* yakni pengambilan sampel berdasarkan kriteria yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan data penelitian. Sampel pada penelitian ini berjumlah 130 orang yang merupakan pegawai bagian anggaran dan keuangan OPD Kota Bukittinggi yaitu Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pembuat Anggaran (PA) atau Kasi Anggaran, Kasubag Keuangan/PPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran. Pengambilan sampel pada bagian keuangan dipilih oleh peneliti karena bagian tersebut secara aktif terlibat dalam kegiatan operasional dan teknis dari Instansi Pemerintahan. Bagian keuangan sangat mengetahui secara rinci kegiatan Organisasi Perangkat Daerah, sehingga ketika adanya indikasi kecurangan maupun kesalahan prosedur yang terjadi, Pegawai yang bekerja pada bagian keuangan secara potensial dapat menjadi *whistleblower*.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data subjek. Data berupa tanggapan penulis atas atau kuisisioner dari subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari pihak pertama dengan menyebarkan kuisisioner kepada pegawai yang bekerja pada bagian keuangan dan anggaran OPD Kota Bukittinggi

Teknik Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan (*field research*) dimana peneliti menggunakan kuesioner dengan cara membagi 5 angket kuesioner yang berisi pertanyaan ataupun pernyataan terstruktur kepada setiap 26 OPD Kota Bukittinggi secara langsung. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi daftar pernyataan pada responden untuk dijawab. Sumber data penelitian ini adalah skor dari masing-masing indikator variabel yang diperoleh melalui pengisian kuesioner yang telah dibagikan pada masing-masing OPD Kota Bukittinggi.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur indikator/variabel dalam rangka mengumpulkan data agar memperoleh instrumen penelitian yang baik. Penelitian ini menggunakan kuesioner berupa pernyataan yang berhubungan dengan variabel dalam penelitian. Variabel yang diteliti menggunakan pengukuran skala likert 1 sampai dengan 5 yang memiliki lima alternatif jawaban yaitu sebagai berikut : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS).

Variabel Sikap (X1) dan Kontrol Perilaku (X2) bersumber dari penelitian Park dan Blenkinsopp (2007) yang telah dikembangkan oleh Saud (2016) dan Zakaria, Razak, Noor (2016). Variabel Religiusitas (X3) bersumber dari Worthington (2003). Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu Niat melakukan *Whistleblowing* (Y1) bersumber dari penelitian Park dan Blenkinsopp (2007) yang dikembangkan oleh Zakaria, Razak, dan Noor (2016), Suryono, Chariri(2016)

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda setelah melewati uji asumsi klasik untuk mengetahui pengaruh sikap, kontrol perilaku dan religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing* dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Niat melakukan *Whistleblowing*

X1 = Sikap

X2 = Kontrol Perilaku

X3 = Religiusitas

a = Konstanta

b1, b2, b3 = Koefisien regresi dari variabel independen

e = *error term*(tingkat kesalahan dalam penelitian)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Objek Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden yang bekerja pada bagian anggaran dan keuangan pada OPD diantaranya jabatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pembuat Anggaran atau Kasi Anggaran, Kasubag Keuangan/PPA, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP SPM), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, dan Staf Keuangan pada OPD Kota Bukittinggi. Kuesioner diserahkan untuk masing-masing responden atau jabatan . Kuesioner diserahkan ke OPD

pada bagian umum, dari bagian umum di disposisi ke bagian keuangan / bagian anggaran setiap OPD Kota Bukittinggi.

Total responden dalam penelitian ini adalah 26 OPD X 5 orang responden = 130 responden. Total 130 (100%) kuesioner yang disebar, sebanyak 121 (93,08%) kuesioner yang dapat diolah oleh peneliti. Rincian mengenai tingkat pengembalian kuesioner disajikan didalam Tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1
Tingkat Pengembalian Kuisioner

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah kuesioner yang disebar	130
2	Jumlah kuesioner yang kembali	130
3	Jumlah kuesioner yang dapat diolah	121
Responden Rate		93,08%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Jumlah responden berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari pegawai bagian anggaran dan keuangan OPD Kota Bukittinggi diperoleh data terkait dengan jenis kelamin pada Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Jumlah Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Pria	43	35,53%
Wanita	78	64,47%
Total	121	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Jumlah responden berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang terkumpul dari pegawai bagian anggaran dan keuangan OPD Kota Bukittinggi diperoleh data terkait dengan Usia responden pada Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Responden berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
25-35 tahun	27	22,31%
36-45 tahun	57	47,11%
46-55 tahun	32	26,45%
> 55 tahun	5	4,13%
Total	121	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Jumlah responden berdasarkan Jabatan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari pegawai bagian anggaran dan keuangan OPD Kota Bukittinggi diperoleh data terkait dengan Jabatan responden pada Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Jumlah Responden berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah	Persentase
PPK	10	8,26%
PA/Kasi Anggaran	16	13,22%
PPA/Kasubag Keuangan	20	16,53%
KPA	13	10,74%
Bendahara Pengeluaran	16	13,22%
Staf Keuangan	29	23,97%
PP SPM	3	2,48%
PPTK	14	11,57%
Total	121	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Jumlah responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari pegawai bagian anggaran dan keuangan OPD Kota Bukittinggi diperoleh data terkait dengan Pendidikan Terakhir responden pada Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan	Jumlah	Persentase
SMA	4	3,31%
Diploma	11	9,09%
S1	80	66,12%
S2	26	21,49%
S3	0	0%
Total	121	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Jumlah responden berdasarkan Pengalaman Kerja

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari pegawai bagian anggaran dan keuangan OPD Kota Bukittinggi diperoleh data terkait dengan Pengalaman Kerja responden pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6
Jumlah Responden berdasarkan Pengalaman Kerja

Pengalaman Kerja	Jumlah	Persentase
<10 tahun	19	15,70%
11-20 tahun	72	59,50%
21-30 tahun	22	18,18%
>30 tahun	8	6,61%
Total	121	100,00

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Statistik Deskriptif

Tabel 7
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap	121	16	25	21,93	2,380
Kontrol Perilaku	121	11	23	16,50	2,225
Religiusitas	121	24	40	31,69	3,624
Niat Whistleblowing	121	13	25	21,08	2,654
Valid N (listwise)	121				

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat bahwa nilai rata-rata (mean) Niat melakukan Whistleblowing sebagai variabel dependen atau (Y) sebesar 21,08 dengan standar deviasi sebesar 2,654. Nilai maks dan min dari Niat melakukan *Whistleblowing* adalah 25 dan 13. Variabel independen pertama dalam penelitian ini adalah Sikap memiliki nilai rata-rata sebesar 21,93 dengan standar deviasi 2,380. Nilai maks dan mini pada variabel Sikap adalah 25 dan 16. Variabel independen yang kedua adalah Kontrol Perilaku memiliki nilai rata-rata sebesar 16,50 dengan standar deviasi 2,225. Nilai maks dan min variabel Kontrol Perilaku adalah sebesar 23 dan 11. Variabel independen terakhir yaitu Religiusitas memiliki nilai rata-rata sebesar 31,69 dan standar deviasi 3,624. Hal ini menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini beragam dan bervariasi karena standar deviasi yang dimiliki oleh semua variabel besar dari 0.

Uji Validitas

Uji Validitas dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan suatu instrumen penelitian dalam mengungkapkan apakah valid atau tidaknya sasaran pokok pengukuran Kuesioner yang dapat diolah sebanyak 121 kuesioner, untuk dapat melihat validitas dari masing-masing item kuisisioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika r hitung $>$ r tabel, maka dikatakan valid. R tabel untuk $n=121$ adalah 0,150 (dengan taraf signifikan 5% dan $n = 121-2=119$). Secara keseluruhan nilai *Corrected Item Total Correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0,150 atau r hitung $>$ r tabel. Dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari variabel X1, X2, X3 dan Y adalah valid

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas sebagai alat untuk mengukur indikator dari sebuah variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu

Tabel 8
Uji Reliabilitas

Instrumen Variabel	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
Sikap (X1)	0,903	Reliabel
Kontrol Perilaku (X2)	0,707	Reliabel
Religiusitas (X3)	0,830	Reliabel
Niat Whistleblowing (Y)	0,738	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Hasil pada Tabel 8 menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* diatas 0,60, jadi dapat dikatakan semua konsep pengukuran pada masing-masing variabel dari kuesioner adalah reliabel sehingga selanjutnya untuk item-item pada masing konsep variabel layak digunakan sebagai alat ukur.

Uji F

Dasar pengambilan keputusannya adalah dengan membandingkan nilai sig yang diperoleh dengan derajat signifikan pada level $\alpha = 0.05$. Apabila hasil dari uji F adalah signifikan pada level P value $\leq 0,05$ maka model regresi yang digunakan dianggap layak uji

Tabel 9
Uji F
ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	315,197	3	105,066	23,195	,000(a)
	Residual	529,976	117	4,530		
	Total	845,174	120			

a Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, KONTROL PERILAKU, SIKAP

b Dependent Variable: NIAT WHISTLEBLOWING

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Hasil uji pada Tabel 9 diperoleh nilai F = 23,195 dengan nilai signifikansi sebesar P value = 0,000 yang lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa model penelitian yang digunakan dianggap layak uji dan ketiga variabel mampu menjelaskan niat *whistleblowing* pada OPD Kota Bukittinggi.

Koefisien Determinasi R²

Koefisien determinasi (R²) yang pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adjusted R² berarti R² sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan Adjusted R². Nilai koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.17 dibawah ini:

Tabel 10
Uji Adjusted R²

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,611(a)	,373	,357	2,128

a Predictors: (Constant), RELIGIUSITAS, KONTROL PERILAKU, SIKAP

b Dependent Variable: NIAT WHISTLEBLOWING

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 10 besarnya Adjusted R Square adalah 35,7%, hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel Sikap, Kontrol Perilaku dan Religiusitas sebesar 35,7%, sedangkan 64,3% lainnya ditentukan oleh faktor lain yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis (t-test)

Pengujian hipotesis t-test dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} adalah $\alpha=0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n - k = 121 - 5 = 116$ adalah 1,661. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha=0,05$ adalah 1,661. Variabel Sikap (X1) nilai t_{hitung} adalah 7,198 dan nilai sig. adalah 0,000, dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,198 > 1,661$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X1 bernilai positif yaitu 0,614. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Sikap (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*, dengan demikian hipotesis pertama (H1) **diterima**.

Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha=0,05$ adalah 1,661. Variabel Kontrol Perilaku (X2) nilai t_{hitung} adalah -359 dan nilai sig. adalah 0,720 dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,359 < 1,661$ atau nilai signifikansi $0,720 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X2 bernilai negatif yaitu -0,033. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini tidak dapat membuktikan kontrol perilaku (X2) berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran, dengan demikian hipotesis kedua (H2) **ditolak**.

Pengujian Hipotesis 3

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada $\alpha=0,05$ adalah 1,661. Variabel Religiusitas (X3) nilai t_{hitung} adalah 1,967 dan nilai sig. adalah 0,052, dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,967 > 1,661$ atau nilai signifikansi $0,052 > 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X3 bernilai positif yaitu 0,114. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan bahwa Religiusitas (X3) berpengaruh signifikan positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*, dengan demikian hipotesis ketiga (H3) **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh Sikap terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa secara parsial nilai sig $0,000 < 0,05$ dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,198 > 1,661$ berdasarkan data tersebut sikap berpengaruh positif terhadap niat *whistleblowing* sehingga hipotesis pertama penelitian ini diterima.

Individu akan melakukan suatu perilaku jika ia meyakini hal tersebut dapat memberikan keuntungan (hal positif). *Whistleblowing* adalah suatu hal yang positif, dimana ada individu yang mengetahui adanya tindak pelanggaran dan kemudian berani melaporkannya, jadi dapat dikatakan semakin seorang individu memiliki keyakinan bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu hal yang positif dan memberikan efek positif pula, maka individu akan cenderung melakukan perilaku tersebut. Kondisi ini tentu akan meningkatkan niat seseorang untuk melakukan pelaporan tindak pelanggaran atau

whistleblowing, sehingga bila ditafsirkan semakin kecil kecenderungan sikap seorang PNS untuk mendukung *whistleblowing* maka semakin kecil pula minatnya untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil pengujian hipotesis ini juga mendukung penelitian yang dilakukan Winardi (2013), Zakaria, Razak dan Noor (2016) yang menyatakan bahwa sikap dapat mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan *whistleblowing*. Perbedaan pendapat terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Parker et al. (1992) menyatakan bahwa sikap memiliki pengaruh yang sangat lemah terhadap intensi individu untuk dalam menampilkan perilaku *whistleblowing*.

Pengaruh Kontrol Perilaku terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*, berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan SPSS menunjukkan bahwa secara parsial nilai sig $0,720 > 0,05$ dan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,359 < 1,661$ sehingga hipotesis kedua penelitian ini ditolak dan disimpulkan bahwa Kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat melakukan *Whistleblowing*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kontrol perilaku seseorang tidak sejalan dengan niat seseorang untuk melakukan tindakan *whistleblowing*. Kontrol perilaku juga didasari oleh keyakinan bahwa adanya faktor penghambat dan faktor pendukung individu melakukan *whistleblowing*. Faktor penghambat disini dapat berupa teguran atau ancaman dari pihak atasan, perlakuan yang berbeda dari rekan kerja karena berani untuk melaporkan kecurangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Saud (2016) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku tidak berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Alleyne (2013) dan Damayanthi et al. (2017) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku berpengaruh terhadap intensi seseorang melakukan *whistleblowing*

Pengaruh Religiusitas terhadap Niat Melakukan *Whistleblowing*

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap niat melakukan *whistleblowing*, berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan SPSS menunjukkan bahwa secara parsial nilai sig $0,052 > 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $1,967 > 1,661$ dengan demikian hipotesis untuk variabel ketiga (X3) diterima.

Alleyne et al. (2010) berpendapat bahwa apabila dalam diri seseorang memiliki komitmen religiusitas yang tinggi, maka ia akan memiliki niat lebih besar untuk mengungkapkan kejujuran bila terjadi kecurangan ataupun melakukan tindakan jujur itu sendiri karena dalam dirinya tertanam keyakinan untuk selalu berbuat kebaikan termasuk dalam hal melaporkan tindakan kecurangan atau melakukan *whistleblowing*, oleh karena itu menurut Alleyne religiusitas mempengaruhi niat seseorang dalam membuat suatu keputusan etis. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Barnett et al (1996) yang menyatakan bahwa religiusitas seseorang berpengaruh terhadap bagaimana individu mengambil keputusan untuk melaporkan atau tidak melaporkan tindakan kecurangan (*wrongdoing*). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dananjaya & Rizal (2018) yang menyatakan bahwa religiusitas seseorang tidak berpengaruh terhadap niat *whistleblowing*. Niat *whistleblowing* akan berkurang atau bahkan hilang meskipun individu tersebut dapat dikatakan sebagai orang yang religius yang tinggi, dikarenakan masih terdapatnya retalasi (ancaman) dan kurang terlindunginya pelapor (Dananjaya & Rizal, 2018).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti – bukti yang kuat mengenai pengaruh sikap, kontrol perilaku, dan religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing*. Responden dalam penelitian ini adalah 26 OPD Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sikap yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Winardi (2013), Zakaria, Razak dan Noor (2016), Damayanthi (2017) dan Alleyne et al. (2013)
2. Kontrol perilaku yang dimiliki seseorang tidak berpengaruh terhadap niat untuk melakukan *whistleblowing*. Hasil ini mendukung penelitian Saud (2016)
3. Religiusitas berpengaruh terhadap niat melakukan *whistleblowing* Hasil ini mendukung penelitian Keller (2007), Alleyne et al. (2010), Barnett et al (1996)

Keterbatasan

Penelitian yang telah dilakukan masih banyak memiliki kekurangan dan keterbatasan. Keterbatasan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Nilai Adjusted R sebesar 35,7% menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang memiliki kontribusi besar dalam mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing*
2. Penelitian ini hanya meneliti pada OPD Kota Bukittinggi, sehingga untuk OPD daerah lain dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan hasil penelitian

Saran

Penulis menyadari bahwa pengetahuan dan pengalaman penulis baik secara teoritis maupun praktisi terbatas. Penelitian ini dimasa mendatang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa masukan, diantaranya:

1. Peneliti selanjutnya. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menambah jumlah sampel agar dapat menggeneralisasikan hasil penelitian dengan menggunakan responden yang berbeda dan menambah jumlah variabel yang diidentifikasi dapat mempengaruhi niat melakukan *whistleblowing* karena rendahnya nilai *Adjusted R* yang dihasilkan dalam penelitian ini
2. Lembaga pemerintahan. Diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam upaya meningkatkan niat melakukan *whistleblowing* pada OPD Kota Bukittinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. 1991. "The Theory of Planned Behavior". *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, Vol.50, No.2 : 179 - 211.
- Aliyah, Siti. 2016. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Pegawai dalam Melakukan Tindakan Whistle-Blowing". *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol.12 No.2.
- Alleyne, P., D. Devonish, J.Allman and Ayanna Young. 2010. "Measuring Ethical Perceptions and Intentions Among Undergraduate Students in Barbados". *The Journal of American Academy of Business*, Cambridge, Vol.15, No.2 : 319 - 326
- Anonim. "The Sarbanes-Oxley Act of 2002 section 301". Diakses melalui <https://www.whistleblower.org> pada tanggal 24 Juni 2019

- Anonim. “Kronologi Kasus “PAPA Minta Saham sampai Setnov Mundur”. Diakses melalui <https://www.merdeka.com> pada tanggal 19 April 2019
- Bagustianto, R., & Nurkholis. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Pegawai Negeri Sipil (PNS) Untuk Melakukan Tindakan Whistle-Blowing. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1).
- Barnett, Tim., Ken Bass, dan Gene Brown. 1996. “Religiosity, Ethical Ideology, and Intentions to Report a Peer’s Wrongdoing”. *Journal of Business Ethics*, Vol.15, No.11 : 1161 - 1174.
- Burks, Bryan D., dan Robert J. Sellani. 2005. “Ethics, Religiosity, and Moral Development of Business Students”. *Journal of Leadership, Accountability and Ethics*
- Damayanthi, K. S. R. D., Sujana, E., & Herawati, N. T. (2017). Pengaruh Norma Subyektif, Sikap pada Perilaku, Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Melakukan Pengungkapan Kecurangan (Whistleblowing)
- Dananjaya, Dewa Gede Yudha., dan Mawardi Rizal. 2018. “Gender, Religiosity, Positive Mood, and Whistleblowing Intention”. *Jurnal Economics and Business Airlangga University*. Vol.1, No.73
- Elliston, F.A 1982 “Anonymity and Whistleblowing” *Journal of Business Ethics* 1 (1982) 167-177
- Keller, A. Craig., Katherin T. Smith, dan L. Murphy Smith. 2007. “Do Gender, Educational Level, Religiosity, and Work Experience Affect the Ethical Decision-Making of U.S Accountants”. Elsevier Ltd, Vol.18, Issues 3 : 299 - 314.
- Kreshastuti, D. K., & Prastiwi, A. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intensi Auditor Untuk Melakukan Tindakan Whistleblowing (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Semarang). *Diponegoro Journal of Accounting*, 3(2), 1–15.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective Whistle-Blowing. *The Academy of Management Review*, 20(3), 679–708. <https://doi.org/10.2307/258791>
- Park, H., dan J. Blenkinsopp. 2009. “Whistle-blowing as Planned Behavior – a Survey of South Korean Police Officers”. *Journal of Business Ethics*, Vol.85, No.4 : 545 - 556.
- Peraturan Walikota Bukittinggi. 2019. Perwako Nomor 27 Tahun 2019. Tentang Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi
- Ponnu, C. H., K. Naidu, dan W. Zamri. 2008. “Determinants of Whistle Blowing”. *International Review of Business Research Papers*, Vol.4, No.1 : 276 -298.
- Putri, Caesar Marga. 2015. “Pengaruh Pelaporan dan Tingkat Religiusitas terhadap Niat Seseorang melakukan Whistleblowing”. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, Vol.17, No.1 : 42 - 52.
- Saragih, Rahmaluddin., dan Iskandar Azwar. 2018. “Pengaruh Sikap ke arah Perilaku, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Perilaku terhadap Niat dan Perilaku *Whistleblowing* CPNS”. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara BPK RI*, Vol.4, No.1 : 63 - 84.
- Saud, I. M. (2016). Pengaruh Sikap dan Persepsi Kontrol Perilaku Terhadap Niat Whistleblowing Internal-Eksternal dengan Persepsi Dukungan Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 17(2), 209–219. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0056.209-219>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung

- Winardi, Rijadh Djatu. 2013. "The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants' Whistle-Blowing Intention in Indonesia". *Journal of Indonesian Economy and Business*, Vol.28, No.3 : 361 - 376.
- Worthington, Everett L Jr., Nathaniel G. Wade, and Terry L. Hight. 2003. "The Religious Commitment Inventory-10: Development, Refinement, and Validation of a Brief Scale for Research and Counseling". *Journal of Counseling Psychology*, Vol.50, No.1 : 84 - 96.
- Zakaria, M., Razak, S. N. A. A., & Noor, W. N. B. W. M. (2016). Intention: Effects of Planned Behaviour on Whistle Blowing Evidence from Malaysian Police Department. *Middle-East Journal of Scientific Research*, 24(7), 2352–2365. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2016.24.07.22667>